

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2025



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN BARITO KUALA**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala telah dan terus berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat diukur, diuji dan diandalkan. LKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan.

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Hambatan dan kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan/ketertinggalan dan bencana alam maupun bencana sosial.

Hasil asistensi dari Bappelitbang dan perubahan RPJMD Kabupaten maka Sasaran Strategis Dinas Sosial pada Triwulan IV mengalami perubahan. Adapun sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk mencapai indikator kinerja utama yang ditetapkan pada triwulan I - III adalah sebagai berikut :

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial.

Dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala pada Triwulan IV yaitu :

Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri

Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten. sedangkan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah :

1. Pada Sekretariat, menghimpun program / kegiatan bidang terkait penanganan PPKS dan PSKS dan mengelola kesekretariatan.
2. Pada Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Sosial, menangani PPKS (Keluarga Fakir Miskin, Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi, Keluarga Rentan) dan bantuan rumah tidak layak huni serta Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
3. Pada Bidang Rehabilitasi Sosial, menangani PPKS (Anak Balita Terlantar, Anak Terlantar, Penyandang Disabilitas, Lansia Terlantar, Tuna Susila, Gelandangan dan Pengemis)
4. Pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menangani korban bencana alam dan sosial, PBI Pemda, PBI JK, Program Keluarga Harapan (PKH).

Pada Triwulan I-III Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada indikator dengan capaian kinerja untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” tercapai realisasi sebesar 96 persen, sedangkan indikator “ sasaran ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” capaian realisasi sebesar 0,04 persen dan capaian realisasi pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah sebesar 71,33 persen dari target “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sebesar 86,88 persen, sedangkan indikator sasaran ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” target sebesar 0.83 persen dan target pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah sebesar 71,96 persen. Dengan kategori “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” Sangat Baik, sedangkan indikator “ sasaran ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” Sangat Baik dan Kategori pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah Baik.

Peningkatan ini di pengaruhi oleh Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu sebesar 100% penyandang disabilitas yang menerima bantuan alat bantu. Adapun Capaian realisasi kinerja dengan kegiatan yang mencapai 94% adalah Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga.

Pada Triwulan IV Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada indikator dengan capaian kinerja untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” tercapai realisasi sebesar 67,53 persen dan capaian realisasi pada indikator “Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” 100 persen dari target “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” sebesar persen 70 persen” sedangkan indikator sasaran “Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” target sebesar 100 persen. Dengan kategori “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” Cukup, sedangkan indikator “Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” adalah Sangat Baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi	3
1.3 Isu Strategi Organisasi	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Perencanaan Strategi	7
2.1.1 Tujuan	7
2.1.2 Sasaran	8
2.2 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi	14
1. Capaian Kinerja Dinas Sosial	16
1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama	16
1.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis	21
1.2.1. Pengukuran Kinerja	21
B. Akuntabilitas Keuangan	58
BAB IV PENUTUP	62
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bangsa Indonesia pada saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis dan dinamis yang mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan Paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi seimbang antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat dengan prinsip-prinsip dasar antara lain adanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *good governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini akan memudahkan Institusi Pemerintah melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban urusan wajib dalam bidang pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai peran yang signifikan dan terus berupaya dalam penerapan prinsip dasar *good governance*.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial”. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Barito Kuala selain sebagai perwujudan amanat konstitusi juga ditujukan dalam rangka Tujuan RPD 2023-2026 adalah : “Meningkatkan Aktifitas Ekonomi Masyarakat yang Tertib Melalui Peningkatan Produktifitas dan Hilirisasi Produk Lokal Unggulan Daerah Dalam Rangka Membuka Peluang Kerja yang Berdampak Pada Peningkatan Pendapatan Daerah” dimana Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melaksanakan misi ke-1, yaitu : “Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial Masyarakat serta menurunkan Tingkat kemiskinan”. Pada tahun 2025 Dinas Sosial melaksanakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial dengan sasaran Kinerja Utamanya adalah Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Sasaran kinerja utama ini didukung oleh sasaran kinerja yang lain yang direalisasikan oleh bidang-bidang teknis

yang ada pada Dinas Sosial yaitu meningkatnya Pemberdayaan keluarga miskin, meningkatnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Anak Terlantar, meningkatnya pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas, terpenuhinya kebutuhan dasar untuk Lanjut Usia Terlantar dan meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Keluarga Miskin melalui bantuan sosial dari Kementerian Sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sembako dan kepesertaan PBI.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini dilaksanakan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran. Hal terpenting lainnya dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut, dengan kata lain, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan informasi kinerja yang teratur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.
- b. Mendorong Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
- c. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala untuk meningkatkan kinerjanya.
- d. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala didalam pelaksanaan program/kegiatan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi, Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sebagai Instansi Pemerintah dalam lingkup Kabupaten Barito Kuala bertugas melaksanakan urusan di bidang Sosial dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2021 tentang uraian tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Tugas :

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Fungsi :

Dinas Sosial Kabupaten Barito kuala melaksanakan fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Pelaksanaan pembinaan umum dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
3. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
4. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
5. Pengevaluasian atas pelaksanaan tugas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial serta kelembagaan dan pemberdayaan sosial.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

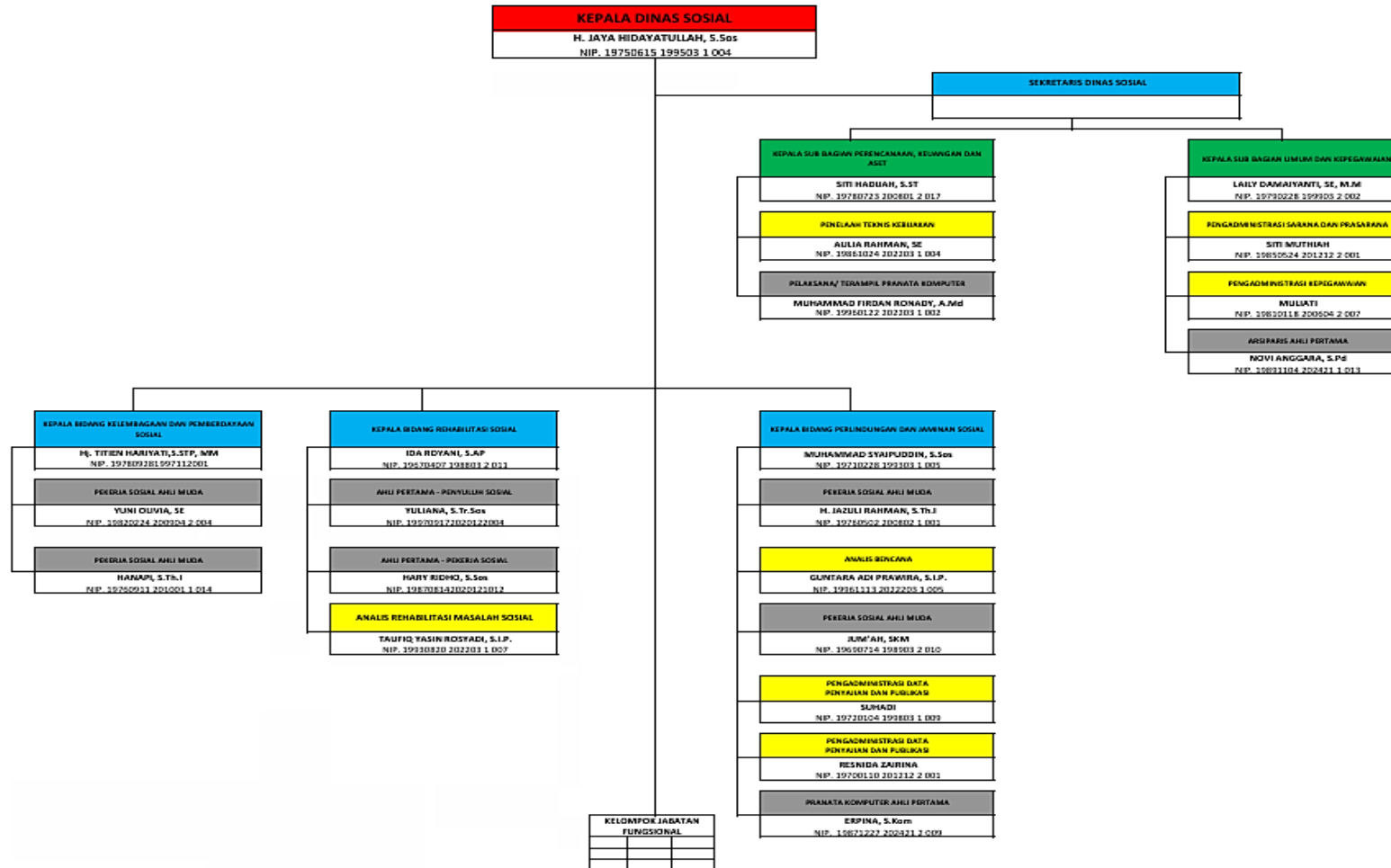
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh Sumber Daya Manusia dengan perkembangan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1
Sumber Daya Manusia Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

No.	Jabatan / Eselon	Jumlah
1.	ASN Dinas Sosial	49 orang
	Eselon II	1 Orang
	Eselon III	4 Orang
	Eselon IV	2 Orang
	Pejabat Fungsional	4 Orang
	Pelaksana	11 Orang
	PPPK	11 Orang
	PPPK Paruh Waktu	13 Orang
2.	Tenaga Honorer Dinas Sosial	3 Orang
TOTAL		49 Orang

Adapun Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dalam mendukung pelaksanaan Tupoksi tersebut adalah Gedung Kantor Dinas Sosial, Bangunan Sekretariat PKH, Rumah Singgah dan Gedung/Gudang Logistik, sedangkan sarana mobilitas pendukung dari Kementerian Sosial untuk operasional bencana berupa Mobil Truk, Mobil Recue Tactical Unit (RTU), Mobil DUMLAP (Dapur Umum Lapangan), Kendaraan Trail, Perahu Dolphin. Sarana mobilitas pendukung dari Pemda Barito Kuala adalah Mobil Innova Merk Toyota 1 buah, Mobil Toyota Avanza 1 buah, Mobil APV 1 buah.

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA**



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala

1.3 Isu Strategis Organisasi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal ini tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kesejahteraan sosial kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, telaah tujuan dan sasaran Kementerian Sosial, dapat disimpulkan isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala adalah: “Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) belum optimal dan Belum Optimalnya Nilai SAKIP Dinas sosial, yang diiringi dengan:

1. Ketersediaan *database* PPKS yang terus mengalami perbaikan/verifikasi.
2. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki komitmen dan kompetensi yang memadai sebagai pelaku pembangunan kesejahteraan sosial.
3. Pembangunan kesejahteraan sosial khususnya dalam penanganan PPKS yang dikembangkan selama ini umumnya tidak berjalan efektif atau tidak maksimal, karena cenderung hanya menyentuh masalah dihilir, sementara akar masalah ini tingkat hulu tidak banyak ditangani. Pendekatan penyantunan terhadap PPKS memang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi dengan dukungan yang terbatas, tentu sulit bagi Dinas Sosial dan Dinas terkait lain di Kabupaten Barito Kuala untuk dapat mengatasi akar masalah yang sebenarnya.
4. Sinergitas dan sinkronisasi program/anggaran yang kurang konsisten, efektif, berkelanjutan dan terfokus serta sulit diukur tingkat capaian keberhasilannya.
5. Perumusan strategi perlindungan dan pemberian jaminan sosial yang terintegrasi dengan program lain berkaitan dengan penanganan masalah sosial di daerah.
6. Ancaman bencana alam banjir dan bencana sosial merupakan bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Barito Kuala.
7. Peningkatan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam mewujudkan pelayanan kesejahteraan sosial yang melembaga dan berkelanjutan. Kurang optimalnya penanganan, perawatan dan kepedulian anggota keluarga atau kerabat terhadap PPKS itu sendiri.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2023-2026 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2023–2026 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, Rencana Strategis Dinas Sosial yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2022 tanggal 31 Maret 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat daerah Tahun 2023-2026 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yaitu dengan tujuan pada Triwulan I-III : Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial.

Hasil asistensi dari Bappelitbang dan perubahan RPJMD Kabupaten maka Sasaran Strategis Dinas Sosial pada Triwulan IV mengalami perubahan yaitu : Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri, dan Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial.

2.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Sosial sebelum perubahan adalah Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dan Tujuan Renstra Dinas Sosial

setelah perubahan yaitu Terwujudnya Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Serta Menurunnya Tingkat Kemiskinan.

2.1.2 Sasaran

Sasaran Renstra Dinas Sosial adalah Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dibuat Indikator kinerja yang akan dicapai, yaitu: “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha dan Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial”, melalui kegiatan :

- 1) Dari segi kelembagaan sosial, telah terdata sebanyak 4 (empat) buah organisasi yang berbasis sosial kemasyarakatan. Namun demikian kemampuan operasional organisasi sosial masih terkendala pada kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Kedepan akan dilakukan pendataan kelembagaan sosial yang lebih komprehensif.
- 2) Pada tahun 2025 telah disalurkan bantuan sosial kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), dengan kriteria:
 - Masuk didalam Data terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
 - Mempunyai embrio usaha ekonomi produktif yang dapat dikembangkan
 - Telah menikah (keluarga dewasa)
 - Keterbatasan kemampuan sosial ekonomi, sehingga berpotensi bermasalah
 - Pekerjaan tidak tetap atau punya pekerjaan tetapi tidak memiliki keterampilan khusus
 - Rumah yang mendapatkan bantuan peralatan dan perlengkapan rumah tangga tidak berada di jalur hijau dan mempunyai bukti kepemilikan tanah.

Adapun bantuan sosial yang diberikan berupa :

- a) Bantuan sosial untuk 11 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) mendapat bantuan berupa 11 set tenda dan perlengkapannya;
- b) Bantuan sosial barang untuk 5 Orang Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) mendapat bantuan ternak ayam berupa 100 ekor ayam, 10 buah lampu pijar, 15 buah tempat minum ayam, 5 buah kandang, 15 buah tempat makan ayam, 1 set vitamin dan 10 zak pakan.

- c) Bantuan sosial untuk 18 KK Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga untuk Bedah Rumah Sehat Ala TP-PKK mendapat bantuan berupa peralatan dan perlengkapan rumah tangga.
 - d) Bantuan berupa pelatihan keterampilan sebanyak 30 orang.
 - e) Bantuan sosial berupa barang 37 paket untuk anggota veteran dan janda veteran berupa paket sembako.
 - f) 48 orang Lansia yang menerima bantuan berupa paket sembako.
 - g) Penyandang disabilitas yang mendapatkan bantuan alat bantu sebanyak 3 orang.
 - h) Penyandang disabilitas yang mempunyai pekerjaan tetap sebanyak 2 orang
 - i) Anak dan atau anak terlantar yang diberikan bimbingan dan atau pelatihan kerja sebanyak 118 orang
 - j) Orang terlantar, eks narapidana dan penyandang penyakit sosial lainnya yang diberi bantuan sebanyak 10 orang.
 - k) Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima bantuan jaminan/perlindungan sosial sebanyak 7681 jiwa.
 - l) Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin sebanyak 38.441 KK .
 - m) Jumlah penerima bantuan PBI Pemda sebanyak 9.692 KK
 - n) Graduasi PKH yang mandiri sebesar 215 KK
- 3) Hingga bulan Desember 2025 telah disalurkan bantuan logistik dan pelayanan Psikososial kepada masyarakat korban bencana alam dan sosial sebanyak 122 KK.

Secara lebih rinci tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

Sebelum perubahan Sampai Triwulan III

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Meningkatkan Kemandirian Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mandiri	1. Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mandiri
			2. Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	2. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu Berusaha	
			3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026

Sesudah perubahan Triwulan IV

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan	Indeks Kesejahteraan Sosial	1. Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mandiri

			3. Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	2. Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial
--	--	--	---	---	---

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan, sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki satu sasaran dengan satu Indikator Kinerja yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mandiri. Indikator ini didukung oleh 4 (empat) program utama dan 1 (satu) program penunjang.

Adapun 4 (empat) program utama yaitu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan anggaran Rp. 1.035.011.195,00, Program Penanganan Bencana dengan anggaran Rp. 357.269.247,00, Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran Rp. 3.440.417.357,00 dan Pemberdayaan Sosial dengan anggaran Rp. 1.869.149.694,00.

Sedangkan 1 (satu) program Penunjang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 4.760.095.556,00.

Total anggaran Belanja Daerah DPA Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 11.461.943.049,00 (Sebelas Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun kedua dari kerangka pembangunan lima tahunan periode 2023-2026.

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025, bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2025

Sebelum perubahan sampai Triwulan III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhannya	%	86,88	Perlindungan dan Jaminan Sosial Penanganan Bencana Rehabilitasi Sosial	1.035.011.195 357.269.247 3.440.417.357
2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha	%	0,83	Pemberdayaan Sosial	1.869.149.694
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	%	71.96	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.760.095.556

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Sosial Tahun 2025

Setelah perubahan pada Triwulan IV

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	%	70	Perlindungan dan Jaminan Sosial Penanganan Bencana Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Sosial	1.035.011.195 357.269.247 3.440.417.357 1.869.149.694

2	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	%	100	Rehabilitasi Sosial	3.440.417.357
					Penanganan Bencana	357.269.247

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat capaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam Dokumen Renstra Tahun 2023 - 2026, RKT Tahun 2025, Renja Tahun 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Nomor: 050/040/DISSOS, tanggal 02 Januari 2024 tentang Perubahan Pertama Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 – 2026 yang semula 1 (satu) Sasaran dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama menjadi 3 (tiga) Sasaran dan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama.

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah Program, Kegiatan, dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana program, kegiatan, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat. Pengukuran kinerja merupakan bentuk penilaian yang dilakukan terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.

Dalam rangka Pengukuran kinerja, dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Predikat kriteria capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan pendekatan Permendagri nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Tabel. 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

Persentase	Predikat
<100	Tidak tercapai
= 100	Tercapai/Sesuai target
>100	Melebihi target

Berdasarkan Tabel 3.1 Nilai Capaian Kinerja untuk persentase < 100 mendapatkan predikat Tidak tercapai, untuk persentase = 100 mendapatkan predikat Tercapai / Sesuai target, sedangkan untuk persentase > 100 maka predikat nilai capaian kinerjanya yaitu melebihi target.

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut:

Tabel .3.2
Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang Tidak tercapai

No	Kategori	Capaian
1	Sangat baik	>90
2	Baik	75 – 89,99
3	Cukup	65 – 74,99
4	Kurang	50 – 64,99
5	Sangat kurang	0 – 49,99

Berdasarkan Tabel 3.2 Predikat Capaian Kinerja untuk Realisasi Capaian Kinerja yang tidak tercapai, dikategorikan kedalam 5 penilaian yaitu, sangat baik, baik, cukup, kurang dan sangat kurang.

1. Capaian Kinerja Dinas Sosial

1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan demikian IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor : NOMOR 460/038/DISSOS tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023-2026. Adapun hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025
Sampai Triwulan III

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	Jumlah PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus	86,88	96	110
2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	Jumlah PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah PPKS) Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus	0,83	0,04	4,8
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	Persen	Nilai SAKIP	71.96	71.33	99

Dari Tabel 3.3 di atas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sebesar 96%. Dalam hal ini lebih besar dari yang ditargetkan yakni 86,88%, yang berarti program yang bertujuan untuk Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” sebesar 0,04%. Dalam hal ini menunjukkan angka dibawah target yaitu sebesar 0,83%.

Dan untuk capaian Indikator Kinerja Utama “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” pada tahun 2025 sebesar 71,96. Dalam hal ini menunjukkan angka dibawah target yaitu 71,33.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Tahun 2025
Triwulan IV

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Formulasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persen	Jumlah PPKS Yang Mandiri/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus	70	67,53	96
2	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persen	Jumlah PPKS Yang Mendapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Jumlah PPKS Yang Terkait Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kab. Batola dikalikan seratus	100	100	100

Dari Tabel 3.4 di atas dapat diuraikan bahwa pada tahun 2025, capaian kinerja Triwulan IV untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” sebesar 67,53%. Dalam hal ini lebih kecil dari yang ditargetkan yakni 70%, yang berarti program yang bertujuan untuk Meningkatkan Pemenuhan

Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) telah dilaksanakan dengan cukup baik.

Untuk Capaian Indikator Kinerja Utama ” Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” sebesar 100%. Dalam hal ini untuk indikator tersebut mencapai target.

Tabel 3.5
Capaian IKU Dinas Sosial
Berdasarkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) yang mandiri Tahun 2025

Sebelum Perubahan sampai Triwulan III

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	2
= 100	Tercapai/Sesuai target	0
>100	Melebihi target	1

Tabel 3.6
Capaian IKU Dinas Sosial
Berdasarkan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS) yang mandiri Tahun 2025

Sesudah Perubahan Triwulan IV

Persentase	Predikat	Jumlah Indikator
<100	Tidak tercapai	1
= 100	Tercapai/Sesuai target	1
>100	Melebihi target	0

Berdasarkan Tabel 3.5 capaian sampai triwulan III dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki 3 (tiga) indikator kinerja utama, yaitu Pertama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dengan capaian 110% dikategorikan >100% sehingga **dikategorikan Melebihi Target**, Kedua Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha dengan capaian 0,04% dikategori <100 sehingga **dikategorikan Tidak Tercapai**. dan ketiga Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dengan capaian 99% sehingga **dikategorikan Tidak Tercapai**.

Berdasarkan Tabel 3.6 capaian triwulan IV dijelaskan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memiliki 2 (dua) indikator kinerja utama, yaitu Pertama “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” dengan

capaian 96% dikategorikan <100 sehingga **dikategorikan Tidak Tercapai**, Kedua Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial dengan capaian 100% dikategori =100 sehingga **dikategorikan Tercapai**.

Tabel 3.7
Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori
Tahun 2025 Sampai Triwulan III

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	1

Berdasarkan tabel diatas didapatkan 2 (dua) indikator dengan kategori sangat baik karena persentase capaian lebih dari 90 % dan 1 (satu) indikator dengan kategori sangat kurang dengan persentase di bawah 49,99%.

Tabel 3.8
Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori
Tahun 2025 Triwulan IV

No	Kategori	Capaian	Jumlah Indikator
1	Sangat baik	>90	2
2	Baik	75 – 89,99	0
3	Cukup	65 – 74,99	0
4	Kurang	50 – 64,99	0
5	Sangat kurang	0 – 49,99	0

Berdasarkan tabel diatas didapatkan 2 (dua) indikator dengan kategori sangat baik karena persentase capaian lebih dari 90 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9
Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori
Tahun 2025 sampai triwulan III

No	IKU	Formulasi	Target	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Jumlah PPKS Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus	86,88	110	Sangat Baik
2	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Jumlah PPKS) Yang Mampu Berusaha / Jumlah PPKS) Yang Menjadi Sasaran Berusaha dikalikan seratus	0,83	4,8	Sangat Kurang
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP	71.96	99	Sangat Baik

Tabel 3.10
Capaian IKU Dinas Sosial Berdasarkan Kategori
Tahun 2025 triwulan IV

No	IKU	Formulasi	Target	Capaian (%)	Kategori
1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Jumlah PPKS Yang Mandiri/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus	70	96	Cukup
2	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Jumlah PPKS Yang Mendapat Standar Pelayanan Minimal	100	100	Sangat Baik

		(SPM) / Jumlah PPKS Yang Terkait Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kab. Batola dikalikan seratus			
--	--	---	--	--	--

1.2 Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

1.2.1 Pengukuran Kinerja

Dalam laporan ini, Dinas Sosial dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Renja Tahun 2025.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Nomor : 460/038/DISSOS tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial, telah ditetapkan 3 (Tiga) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator Sasaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.11
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Sampai Triwulan III

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	1 indikator
Sasaran Strategis 3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	1 indikator

Berdasarkan Tabel 3.11 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai 3 (tiga) sasaran strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (RPD) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan sasaran Menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” tersebut ditetapkan dengan indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

Berdasarkan DTKS pada tahun 2025 diketahui bahwa jenis PPKS di Kabupaten Barito Kuala terdapat 14 jenis yaitu sebanyak 15.251 KK, dan pada tahun 2025 PPKS yang telah diberikan bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebanyak 14.718 PPKS, dengan demikian capaian realisasi kinerja =

$$\frac{\text{Jumlah PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} \times 100 =$$

$$\frac{14.718 \text{ KK}}{15.251 \text{ KK}} \times 100 = 96\%.$$

Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” ditetapkan target sebesar 86.88% (13.250 PPKS) dari jumlah seluruh PPKS 15.251 PPKS.

Tahun 2025 tersebut PPKS yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 96 %, (14.718 PPKS) dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ”Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” adalah 110 % ($96\% / 86.88\% \times 100 = 110\%$).

Tabel 3.12
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	86.88	96	110

Berdasarkan Tabel 3.12 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya “ tahun 2024 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk capaian telah **tercapai** tetapi mengalami penurunan pada tahun sebelumnya sebesar 134,32 %.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.13
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	92,71	96

Dari table 3.13 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” mengalami peningkatan 3,29 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2025).

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi kinerja indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 92.71 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” di tahun 2025 telah ditetapkan 69.55 %

Tabel 3.14
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasarnya
Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA (2025)	Persentase Capaian s/d 2025 terhadap Renstra
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	86.88	96	69.55	96

Berdasarkan tabel 3.14 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025 telah mencapai 96 %.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar. Perbandingan realisasi hanya dapat dibandingkan dengan Kota lain yaitu Palangkaraya, seperti dibawah ini :

**Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi
kebutuhan dasar pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025**

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	86,88	96	110

Perbandingan realisasi dengan Kota lain yaitu Palangkaraya, seperti dibawah :

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase PPKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persen	100%	99,19%	99,19

Dari tabel diatas didapat perbandingan bahwa secara realisasi kinerja khususnya pada sasaran 1, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sudah baik meskipun terdapat selisih 3,19 point dari Kota Palangkaraya.

5) Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya adanya komitmen pimpinan untuk memberikan bantuan terhadap PPKS dikabupaten Barito Kuala, sehingga diupayakan dan diharapkan tidak ada lagi PPKS di kabupaten Barito Kuala yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Penyebab Keberhasilan terhadap Sasaran Strategis 1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu :

- Perencanaan dan Penganggaran yang telah disesuaikan dengan kaidah yang berlaku.
- Dukungan dan kordinasi yang efektif antara Pekerja Ahli Sosial dan Relawan Sosial.
- Dukungan Alat Transportasi untuk menunjang kegiatan.
- Adanya Komitmen dan kerjasama yang baik antara Pelaksana kegiatan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- Tersedianya data yang valid dan terpenuhinya persyaratan secara administrasi.
- Monitoring dan evaluasi yang terus dilakukan sebagai upaya menjamin pelaksanaan dan keberhasilan kegiatan.

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 terhadap PPKS dikabupaten Barito Kuala antara lain :

- a. Memberikan bantuan kepada anak terlantar baik dalam panti maupun diluar panti sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala nomor : 100.3.3.2 / 60 / KUM / 2025 tanggal 4 Februari 2025 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Tahun Anggaran 2025.
- b. Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 440 / KUM / 2025 Tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pemberian Hibah Barang Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas.
- c. Memberikan bantuan Veteran dengan klasifikasi Janda Veteran dan Veteran Pejuang sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 287 / KUM / 2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Pemberian Barang Berupa Sembako Bagi Anggota Veteran dan Janda Veteran Tahun 2025.
- d. Memberikan bantuan Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 351 / KUM / 2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2025.
- e. Memberikan bantuan Sosial Kepada Masyarakat/Keluarga dan atau Perorangan (Individu) yang terkena musibah/bencana yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 226 /

KUM / 2025 tanggal 25 April 2025 tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat atau Keluarga dan atau Perorangan (Individu) yang terkena musibah/bencana yang tidak direncanakan di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2025) untuk tercapainya indikator kinerja ”Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” :

- a. Terus melaksanakan pendataan sampai verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan sasaran layanan yang tepat sesuai dengan jenis-jenis PPKS
- b. Menjalin kerjasama dengan Kementrian Sosial untuk mendapatkan akses layanan berupa bantuan dan perlindungan sosial
- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan khususnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS baik kuantitas maupun kualitas
- d. Memaksimalkan penggunaan data PPKS oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membuat payung hukumnya agar menjadi satu data yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Perlunya Komitmen dan dukungan anggaran yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlayani dengan baik.

6) Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 1 ” Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dialokasikan dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2025 Rp. 4.832.697.799,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.751.928.388,00 56,94%.

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya digunakan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188/45/293/KUM/2023 tentang Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

Cki = Capaian Kinerja

RAKi = Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

$$\begin{aligned} &= \frac{(4.832.697.799,00 \times 110\%) - 2.751.928.388,00}{4.832.697.799,00 \times 110\%} \times 100\% \\ &= \frac{5.315.967.578,9 - 2.751.928.388,00}{5.315.967.578,9} \times 100\% \\ &= \frac{2.564.039.190,90}{5.315.967.578,9} \times 100\% \\ &= 0,482 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya sebesar 0,482 termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	110	92,28	0,482%

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 1** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan tingkat efisiensi sebesar 0,482%.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan indikator kinerja “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Sub Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	3.440.417.357,00	2.186.672.720,00	63,56	Penyediaan Alat Bantu	157.302.636,00	111.385.368,00	70,81
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.180.000,00	700.000,00	7,63
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	591.304.696,00	79.830.952,00	13,50
					Pemberian Layanan Kedaruratan	15.648.025,00	0,00	0,00
					Penyediaan Permakanan	2.666.982.000,00	1.994.756.400,00	74,79
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.035.011.195,00	390.634.465,00	35,54	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	464.115.745,00	45.558.400,00	9,82
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	570.895.450,00	345.076.065,00	60,44

3.	Penanganan Bencana	357.269.247,00	174.621.203,00	48,88	Penyediaan Makanan	357.269.247,00	174.621.203,00	48,88
Total		4.832.697.799,00	2.751.928.388,00	56,94		4.832.697.799,00	2.751.928.388,00	56,94

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Sasaran “Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (RPD) yaitu Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah dengan sasaran Menurunkan tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” tersebut ditetapkan dengan indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang mampu berusaha}}{\text{Jumlah 3 jenis PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

Berdasarkan DTKS pada tahun 2025 di kabupaten Barito Kuala diketahui bahwa jumlah 3(tiga) jenis PPKS yaitu :

a. Fakir Miskin = 14.040

b. Anak Terlantar = 51

c. dan Penyandang Disabilitas = 688

Jumlah = 14.779 KK

Sampai dengan tahun 2025 jumlah PPKS yang telah diberi bantuan sehingga mampu berusaha sendiri (mandiri) berusaha sebanyak 7 KK. Sehingga realisasi kinerja untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha :

$$= \frac{\text{Jumlah PPKS yang mampu berusaha}}{\text{Jumlah 3 jenis PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

$$= \frac{7 \text{ KK}}{14.779 \text{ KK}} \times 100 = 0,04 \%$$

Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” ditetapkan target sebesar 0,83% (123 KK) dari jumlah 3 jenis PPKS sebesar 14.779 KK.

Tahun 2025 tersebut PPKS yang mampu berusaha sebesar 0,83 %, (123 KK) dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” adalah 0,04 % ($0,04\%/0,83\% \times 100 = 4,8\%$).

Tabel 3.16
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Mampu Berusaha
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	0.83	0,04	4,8

Berdasarkan Tabel 3.16 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha “ tahun 2025 dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 hanya mencapai (4,8%).

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.17
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha
Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	Persen	0,73	0,04

Dari table 3.17 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” mengalami penurunan sebesar 0,69 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2024) karena kemandirian dan produktifitas disabilitas masih rendah, pada sasaran lanjut usia Usaha Ekonomi Produktif (UEP) berjalan tidak efektif, dan keterbatasan pendanaan/anggaran,

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi kinerja indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 0,04 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” di tahun 2025 telah ditetapkan 0,83 %

Tabel 3.18
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA (2024)	Persentase Capaian s/d 2024 terhadap Renstra
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha	0,83	0,04	1,32	4,8

Berdasarkan tabel 3.18 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025 tidak tercapai (hanya 0,04%) dari target dalam Renstra.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar.

5) Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Adapun Penyebab Kegagalan terhadap capaian kinerja yaitu :

- Belum maksimalnya penggunaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) oleh Kabupaten/Kota sehingga penanganan PPKS masih belum merata.
- Faktor internal seperti kurangnya tenaga yang fokus mengelola usaha dan faktor eksternal dari persaingan pasar

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 terhadap 3 jenis PPKS dikabupaten Barito Kuala antara lain :

- a. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 311 / KUM / 2025 Tanggal 16 Juni 2025 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-P) Tahun 2025. Bantuan diberikan kepada 5 Orang yaitu yang beralamat di desa Pulau Alalak Rt. 009 an. Abidin, Mahruf, Saleh dan Muhammad Surya, desa Pulau Alalak Rt. 002 an. Mahyudin. Adapun bantuan yang diserahkan untuk mendukung Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-) berupa 100 Ekor Ayam Buras Dara, 10 Buah Lampu Pijar, 15 Buah Tempat Minum Ayam, 5 Buah Kandang, 15 Buah Tempat Makan Ayam, 1 Set Vitamin, dan 10 zak Pakan berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 311 / KUM / 2025 Tanggal 16 Juni 2025.
- b. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 547 / KUM /2025 Tanggal 27 Oktober 2025 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) Tahun 2025. Terdapat 4 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu Kube “KD Kencana” diketuai Kuat di Desa Karang Dukuh Kec. Belawang, Kube “PD Berkah Bersama” diketuai

Alpianor di Desa Puntik Dalam Kec. Mandastana, Kube “Matahari” diketuai Imam Syafi’i di Desa Karang Bunga Kec. Mandastana dan Kube ‘ Mandiri Bersama” diketuai Yani di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan. Barang yang diserahkan berupa Tenda dan Perlengkapannya, rincian berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 547 / KUM /2025 Tanggal 27 Oktober 2025

- c. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 312 / KUM /2025 Tanggal 16 Juni 2025 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) Tahun 2025. Terdapat 7 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), rincian berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 312 / KUM /2025 Tanggal 16 Juni 2025.

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2026) untuk tercapainya indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” :

- Memaksimalkan penggunaan data PPKS oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membuat payung hukumnya agar menjadi satu data yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- Perlunya Komitmen dan dukungan anggaran yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlayani dengan baik.

6) Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 2 ”Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dialokasikan dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi anggaran untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” sebesar Rp. 431.659.505,00,00 dari total pagu sebesar Rp. 1.869.149.694,00 dengan capaian kinerja sebesar 23,09%

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya digunakan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188/45/293/KUM/2023 tentang Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

Cki = Capaian Kinerja
 RAKi = Realisasi Anggaran
 Batas maksimal nilai nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

$$= \frac{(1.869.149.694,00 \times 4,8\%) - 431.659.505,00}{1.869.149.694,00 \times 4,8\%} \times 100$$

$$= \frac{89.719.185,312 - 431.659.505,00}{89.719.185,312} \times 100\%$$

$$= \frac{-341.940.319,688}{89.719.185,312} \times 100\%$$

$$= -3,811.$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha sebesar -3,811 termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.19
Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha	4,8	23,09	-3,811

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 2** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha dengan tingkat efisiensi sebesar -3,811%.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)” dengan indikator kinerja “ Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Sub Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Pemberdayaan Sosial	1.869.149.694,00	431.659.505,00	23,09	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.864.199.694,00	431.659.505,00	23,09
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	4.950.000,00	0,00	0,00
Total		1.869.149.694,00	431.659.505,00	23,09		1.869.149.694,00	431.659.505,00	23,09

SASARAN STRATEGIS 3

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

Sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” . Sebagai upaya pencapaian sasaran ini Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Nilai SAKIP Dinsos.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” tersebut ditetapkan dengan indikator “Nilai SAKIP Dinsos” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

$$\text{Nilai SAKIP Dinsos} = \frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}} \times 100$$

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Nomor 700/78/IP/2024 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Barito Kuala tanggal 25 Juni 2025, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Sosial menunjukkan nilai sebesar **71,33** dengan predikat “**BB**”, dengan perhitungan sebagai berikut :

Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos tahun 2025 = 71,33

Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos = 71,96

Maka realisasi kinerja indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}}{\text{Target Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos}} \times 100 =$$

$$\frac{71,33}{71,96} \times 100 = 99 \%$$

Capaian Kinerja atas Indikator Nilai SAKIP Dinsos dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk indikator kinerja ” Nilai SAKIP Dinsos” ditetapkan target sebesar 71,96 dari Nilai SAKIP Dinsos.

Tahun 2025 tersebut Nilai Evaluasi SAKIP Dinsos sebesar 71,96 dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ” Nilai SAKIP Dinsos” adalah 99% (realisasi/target x 100 = 71,33 / 71,96 x 100 = 99 %)

Tabel 3.20
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP Dinsos Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Nilai SAKIP Dinsos	Nilai	71,96	71,33	99

Berdasarkan Tabel 3.20 Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama “Nilai SAKIP Dinsos “ tahun 2024 (71,91%) dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 mengalami penurunan di komponen Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

- 2) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya**
Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai SAKIP Dinsos tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.21
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP Dinsos Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Nilai SAKIP Dinsos	Nilai	71,91	71,33

Dari table 3.21 dapat dilihat bahwa realisasi “Indikator Kinerja Utama Nilai SAKIP Dinsos” mengalami peningkatan sebesar 0,58 % dibanding dengan tahun sebelumnya (2024).

- 3) **Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.**

Realisasi kinerja indikator “Nilai SAKIP Dinsos” sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 99 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Nilai SAKIP Dinsos” di tahun 2025 telah ditetapkan 71,33 %

Tabel 3.22
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Nilai SAKIP Dinsos Terhadap Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA (2025)	Persentase Capaian s/d 2025 terhadap Renstra
Nilai SAKIP Dinsos	71,96	71,33	71,96	99

Berdasarkan tabel 3.22 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025 telah mencapai 99 %.

- 4) **Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional**

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar.

5) Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pencapaian target indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial didukung oleh Kerjasama yang baik dengan bidang teknis, pemenuhan terhadap dokumen perencanaan dan melaksanakan perbaikan-perbaikan sesuai arahan.

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2026) untuk tercapainya indikator kinerja "Nilai SAKIP Dinsos" :

- a. Meningkatkan kinerja dan capaian target kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial adalah dengan memperkuat sinergitas perencanaan, anggaran dan pelaksanaan serta memperkuat kerjasama lintas sektor dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial.

6) Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya (*Efisiensi bagi kinerja fisik lebih besar atau sama dengan 100% dihitung efisiensi penggunaan sumber daya-nya*)

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 3 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial" dialokasikan dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi anggaran untuk indikator "Nilai SAKIP Dinsos" sebesar Rp. 2.827.731.704,00 dari total pagu sebesar Rp. 4.760.095.556,00 dengan capaian kinerja sebesar 59,40%

Formulasi perhitungan Efisiensi Sumber Daya terhadap Sasaran Strategis Dinas Sosial sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

CKi = Capaian Kinerja

RAKi = Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

$$= \frac{(4.760.095.556,00 \times 99\%) - 2.827.731.704,00}{4.760.095.556,00 \times 99\%} \times 100$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{4.712.494.600,44 - 2.827.731.704,00}{4.712.494.600,44} \times 100\% \\
&= \frac{1.884.762.896,44}{4.712.494.600,44} \times 100\% \\
&= 0,399
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Nilai SAKIP Dinsos sebesar 0,399 termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.23
Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	99	59,40	0,399

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 3** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Nilai SAKIP Dinsos dengan tingkat efisiensi sebesar 0,399%.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” dengan indikator kinerja “ Nilai SAKIP Dinsos” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	4.760.095.556,00	2.827.731.704,00	59,40	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	57.654.202,00	40.612.998,00	70,44

	Daerah Kabupaten/Kota				Perangkat Daerah			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.737.203.047,00	2.352.095.949,00	62,94
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	60.053.250,00	31.446.800,00	52,36
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	531.472.777,00	308.119.174,00	57,97
					Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87.942.280,00	53.568.660,00	60,91
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.770.000,00	41.888.123,00	14,66
Total		4.760.095.556,00	2.827.731.704,00	59,40		4.760.095.556,00	2.827.731.704,00	59,40

Tabel 3.24
Sasaran Strategis dan Jumlah Indikator
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Triwulan IV

Sasaran Strategis 1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahtera an Sosial (PPKS) yang Mandiri	1 indikator
Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	1 indikator

Berdasarkan Tabel 3.24 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala yang mempunyai 2 (dua) sasaran strategis yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri

Sasaran “Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (RPD) yaitu Terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “ Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” tersebut ditetapkan dengan indikator “ Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” dengan formulasi perthitungan indikator sebagai berikut : Jumlah PPKS Yang Mandiri/Jumlah PPKS di Kab. Batola dikalikan seratus

$$\frac{\text{Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} \times 100$$

Berdasarkan DTKS pada tahun 2025 diketahui bahwa jenis PPKS di Kabupaten Barito Kuala terdapat 14 jenis yaitu sebanyak 15.251 KK dengan demikian capaian realisasi kinerja yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah PPKS yang Mandiri}}{\text{Jumlah PPKS di Kab. Batola}} \times 100 = \\ &\frac{10.300 \text{ KK}}{15.251 \text{ KK}} \times 100 = 67,53 \%. \end{aligned}$$

Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri dapat diuraikan sebagai berikut:

1.) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” ditetapkan target sebesar 70% (10.676 PPKS) dari jumlah seluruh PPKS 15.251 PPKS.

Tahun 2025 tersebut PPKS yang telah mandiri sebesar 67,53 %, (10.300 PPKS) dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” adalah 96 % $(67,53\% / 70\% \times 100 = 96 \%)$.

Tabel 3.25
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya
Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persen	70	67,53	96

Berdasarkan Tabel 3.2.15 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri “dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk capaian **tidak tercapai**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.26
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri Tahun 2024
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persen	Tidak Ada	67,53

Dari table 3.2.16 dapat dilihat bahwa untuk indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri merupakan indikator baru di Tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi kinerja indikator “ Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 67,53 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator “ Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” di tahun 2025 telah ditetapkan 70 %

Tabel 3.27
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri Terhadap
Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA (2025)	Persentase Capaian s/d 2025 terhadap Renstra
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	70	67,53	70	96

Berdasarkan tabel 3.2.17 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025 telah mencapai 96 %.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Capaian Kinerja Tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional karena Pemerintah Pusat tidak ada menetapkan standar

5) Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri adanya komitmen pimpinan untuk memberikan bantuan terhadap PPKS di kabupaten Barito Kuala.

Penyebab Keberhasilan terhadap Sasaran Strategis 1 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri yaitu :

- Tersedianya data yang valid dan terpenuhinya persyaratan secara administrasi.
- Dukungan dari Desa dan Kecamatan dalam penyaluran Bantuan.
- Kecepatan staf Bidang untuk mengumpulkan data.
- Dukungan dan koordinasi yang efektif antara Dinas terkait

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 terhadap PPKS di kabupaten Barito Kuala antara lain :

- a. Memberikan bantuan kepada anak terlantar baik dalam panti maupun diluar panti sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala nomor : 100.3.3.2 / 60 / KUM / 2025 tanggal 4 Februari 2025 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Tahun Anggaran 2025.
- b. Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 440 / KUM / 2025 Tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pemberian Hibah Barang Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas.
- c. Memberikan bantuan Veteran dengan klasifikasi Janda Veteran dan Veteran Pejuang sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 287 / KUM / 2025 tanggal 3 Juni 2025 tentang Pemberian Barang Berupa Sembako Bagi Anggota Veteran dan Janda Veteran Tahun 2025.
- d. Memberikan bantuan Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 351 / KUM / 2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2025.
- e. Memberikan bantuan Sosial Kepada Masyarakat/Keluarga dan atau Perorangan (Individu) yang terkena musibah/bencana yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 226 / KUM / 2025 tanggal 25 April 2025 tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat atau Keluarga dan atau Perorangan (Individu) yang terkena musibah/bencana yang tidak direncanakan di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.
- f. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 311 / KUM / 2025 Tanggal 16 Juni 2025 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi

Produktif Perorangan (UEP-P) Tahun 2025. Bantuan diberikan kepada 5 Orang yaitu yang beralamat di desa Pulau Alalak Rt. 009 an. Abidin, Mahruf, Saleh dan Muhammad Surya, desa Pulau Alalak Rt. 002 an. Mahyudin. Adapun bantuan yang diserahkan untuk mendukung Usaha Ekonomi Produktif Perorangan (UEP-) berupa 100 Ekor Ayam Buras Dara, 10 Buah Lampu Pijar, 15 Buah Tempat Minum Ayam, 5 Buah Kandang, 15 Buah Tempat Makan Ayam, 1 Set Vitamin, dan 10 zak Pakan berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 311 / KUM / 2025 Tanggal 16 Juni 2025.

- g. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 547 / KUM /2025 Tanggal 27 Oktober 2025 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) Tahun 2025. Terdapat 4 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yaitu Kube “KD Kencana” diketuai Kuat di Desa Karang Dukuh Kec. Belawang, Kube “PD Berkah Bersama” diketuai Alpianor di Desa Puntik Dalam Kec. Mandastana, Kube “Matahari” diketuai Imam Syafi’i di Desa Karang Bunga Kec. Mandastana dan Kube ‘ Mandiri Bersama” diketuai Yani di Desa Bandar Karya Kecamatan Tabukan. Barang yang diserahkan berupa Tenda dan Perlengkapannya, rincian berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 547 / KUM /2025 Tanggal 27 Oktober 2025
- h. Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 312 / KUM /2025 Tanggal 16 Juni 2025 tentang Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (UEP KUBE) Tahun 2025. Terdapat 7 Kelompok Usaha Bersama (KUBE), rincian berdasarkan Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 312 / KUM /2025 Tanggal 16 Juni 2025

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2025) untuk tercapainya indikator kinerja ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” :

- a. Terus melaksanakan pendataan sampai verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan sasaran layanan yang tepat sesuai dengan jenis-jenis PPKS
- b. Menjalin kerjasama dengan Kementrian Sosial untuk mendapatkan akses layanan berupa bantuan dan perlindungan sosial

- c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan khususnya pemenuhan kebutuhan dasar PPKS baik kuantitas maupun kualitas
- d. Memaksimalkan penggunaan data PPKS oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membuat payung hukumnya agar menjadi satu data yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- e. Perlunya Komitmen dan dukungan anggaran yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlayani dengan baik.

6) Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 1 ” Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” dialokasikan dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2025 Rp. 6.701.847.493,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 6.185.046.049,00 92,28%.

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya digunakan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188/45/293/KUM/2023 tentang Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

CKi = Capaian Kinerja

RAKi = Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(6.701.847.493,00 \times 96\%) - 6.185.046.049,00}{6.701.847.493,00 \times 96\%} \times 100\% \\
 &= \frac{6.433.773.593,28 - 6.185.046.049,00}{6.433.773.593,28} \times 100\% \\
 &= \frac{248.727.544,28}{6.433.773.593,28} \times 100\% \\
 &= 0,038
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri sebesar 0,038 termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.28
Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	96	92,28	0,038%

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 1** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri dengan tingkat efisiensi sebesar 0,038%.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” dengan indikator kinerja “ Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Sub Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	3.440.417.357,00	2.982.851.923,00	86,70	Penyediaan Alat Bantu	157.302.636,00	153.851.534,00	97,81
					Pemberian Pelayanan	9.180.000,00	7.827.410,00	85,27

					Reunifikasi Keluarga			
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	141.304.696,00	140.292.079,00	99,28
					Penyediaan Permakanan	2.666.982.000,00	2.666.982.000,00	100
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.035.011.195,00	1.031.147.950,00	99,62	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	464.115.745,00	463.144.232,00	99,79
					Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	570.895.450,00	568.003.718,00	99,49
3.	Penanganan Bencana	357.269.247,00	356.869.808,00	99,89	Penyediaan Makanan	357.269.247,00	356.869.808,00	99,89
4.	Program Pemberdayaan Sosial	1.869.149.694,00	1.814.176.368,00	97,06	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.864.199.694,00	1.809.226.368,00	97,05
Total		6.701.847.493,00	6.185.046.049,00	98,62		6.231.249.468,00	3.499.215.149,00	98,17

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial

Sasaran “Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” merupakan bagian dari pengimplementasian dalam Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. (RPD) yaitu Terwujudnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran “Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” tersebut ditetapkan dengan indikator “Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” dengan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut : Jumlah PPKS Yang Mendapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) / Jumlah PPKS Yang Terkait Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kab. Batola dikalikan seratus

$$\text{Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial} = \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Mendapat Standar Pelayanan Minimal (SPM)}}{\text{Jumlah PPKS Yang Terkait Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM)}} \times 100$$

Berdasarkan Jumlah PPKS Yang Mendapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Barito Kuala sebanyak 489 Orang dengan demikian capaian realisasi kinerja yaitu :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah PPKS Yang Mendapat Standar Pelayanan Minimal (SPM)}}{\text{Jumlah PPKS Yang Terkait Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kab. Batola}} \times 100 \\ &= \frac{489 \text{ Orang}}{489 \text{ Orang}} \times 100 = 100 \% \end{aligned}$$

Capaian Kinerja atas Indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk indikator kinerja “ Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial ” ditetapkan target sebesar 100% (489 Orang) dari Jumlah PPKS Yang Terkait Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 489 Orang.

Tahun 2025 tersebut Jumlah PPKS Yang Mendapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebesar 100 %, (489 Orang) dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja ” Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” adalah 100 % ($100\% / 100\% \times 100 = 100 \%$).

Tabel 3.29
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persen	100	100	100

Berdasarkan Tabel 3.29 Capaian kinerja “Indikator Kinerja Utama Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial “dengan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 untuk capaian **tercapai**.

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun-Tahun sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial tahun 2025 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3.30
Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri Tahun 2024
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	
		2024	2025
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persen	Tidak Ada	100

Dari table 3.30 dapat dilihat bahwa untuk indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial merupakan indikator baru di Tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun ini Dengan Target Dalam Renstra.

Realisasi kinerja indikator “Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” sampai dengan tahun 2025 telah mencapai 100 %.

Dan berdasarkan dokumen Renstra untuk indikator ” Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” di tahun 2025 telah ditetapkan 100 %

Tabel 3.31
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri Terhadap
Target Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA (2025)	Persentase Capaian s/d 2025 terhadap Renstra
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100	100	100	100

Berdasarkan tabel 3.31 diatas diketahui bahwa capaian kinerja sampai dengan tahun 2025 dibanding dengan target yang telah ditetapkan dalam Renstra tahun 2025 telah mencapai 100 %.

4) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Standar Nasional

Urusan Sosial merupakan salah satu urusan pelayanan wajib dasar yang berkewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga miskin dan rentan yang disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial kewenangan Kabupaten/Kota yang berpendoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Berikut adalah capaian realisasi kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Tahun 2025 :

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional	Realisasi Dinsos Kab. Batola
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga negara Penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/ kota	100%	100%

5) Analisis Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial adanya komitmen pimpinan untuk memberikan bantuan terhadap PPKS dikabupaten Barito Kuala.

Penyebab Keberhasilan terhadap Sasaran Strategis 2 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu :

- Adanya asesmen komprehensif kepada penerima layanan, sehingga intervensi/layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan.
- Kerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan jangkauan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Upaya yang telah dilakukan pada tahun 2025 terhadap Jumlah PPKS Yang Mendapat Standar Pelayanan Minimal (SPM) antara lain :

1. Memberikan bantuan kepada anak terlantar baik dalam panti maupun diluar panti sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala nomor : 100.3.3.2 / 60 / KUM / 2025 tanggal 4 Februari 2025 Tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga Tahun Anggaran 2025.
2. Memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 440 / KUM / 2025 Tanggal 25 Agustus 2025 tentang Pemberian Hibah Barang Bantuan Sosial Kepada Penyandang Disabilitas.
3. Memberikan bantuan Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 351 / KUM / 2025 tanggal 7 Juli 2025 tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat, Individu atau Keluarga Akibat Bencana Yang Tidak Direncanakan Tahun Anggaran 2025.
4. Memberikan bantuan Sosial Kepada Masyarakat/Keluarga dan atau Perorangan (Individu) yang terkena musibah/bencana yang tidak direncanakan Tahun Anggaran 2025 sesuai Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 100.3.3.2 / 226 / KUM / 2025 tanggal 25 April 2025

tentang Bantuan Sosial Kepada Masyarakat atau Keluarga dan atau Perorangan (Individu) yang terkena musibah/bencana yang tidak direncanakan di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.

Upaya yang akan dilakukan di tahun berikutnya (tahun 2025) untuk tercapainya indikator kinerja ” Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial ” :

1. Terus melaksanakan pendataan sampai verifikasi dan validasi data untuk mendapatkan sasaran layanan yang tepat sesuai dengan jenis-jenis PPKS
2. Melakukan penetapan terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial
3. Memaksimalkan penggunaan data PPKS oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan membuat payung hukumnya agar menjadi satu data yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
4. Perlunya Komitmen dan dukungan anggaran yang kuat dari Pemerintah Daerah dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial agar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dapat terlayani dengan baik.

6) Analisis atas Efisiensi Pengguna Sumber Daya

Realiasi Sumber Daya untuk pencapaian sasaran 2 ” Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” dialokasikan dalam DPA Dinas Sosial Tahun 2025 Rp. 3.797.686.604,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.339.721.731,00 87,94%.

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya digunakan berdasarkan Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188/45/293/KUM/2023 tentang Pengukuran Kinerja Kabupaten Barito Kuala dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

PAKi = Total pagu Anggaran

CKi = Capaian Kinerja

RAKi = Realisasi Anggaran

Batas maksimal nilai efisiensi 20% dan batas minimal -20%.

$$= \frac{(3.797.686.604,00 \times 100\%) - 3.339.721.731,00}{3.797.686.604,00 \times 100\%} \times 100\%$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{3.797.686.604,00 - 3.339.721.731,00}{3.797.686.604,00} \times 100\% \\
&= \frac{457.964.873,00}{3.797.686.604,00} \times 100\% \\
&= 0,120
\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut diketahui bahwa penggunaan sumber daya untuk indikator kinerja Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial sebesar 0,120 termasuk dalam batas kategori efisien, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.32
Efisiensi Sumber Daya terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	100	87,94	0,120%

Dari Tabel diatas mengenai Efisiensi penggunaan Sumber Daya Anggaran Dinas Sosial yang memiliki Indikator Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial telah mencapai tingkat efisiensi dimana untuk **Sasaran 2** yang memiliki 1 (satu) indikator kinerja utama yaitu Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial dengan tingkat efisiensi sebesar 0,120%.

7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Untuk menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis “ Meningkatkan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” dengan indikator kinerja “ Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial ” ditunjang dengan Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No.	Program	Anggaran		%	Sub Kegiatan	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi			Pagu	Realisasi	
1.	Program Rehabilitasi Sosial	3.440.417.357,00	2.982.851.923,00	86,70	Penyediaan Alat Bantu	157.302.636,00	153.851.534,00	97,81
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.180.000,00	7.827.410,00	85,27
					Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	591.304.696,00	140.292.079,00	23,72
					Pemberian Layanan Kedaruratan	15.648.025,00	13.898.900,00	88,82
					Penyediaan Permakanan	2.666.982.000,00	2.666.982.000,00	100
3.	Penanganan Bencana	357.269.247,00	356.869.808,00	99,89	Penyediaan Makanan	357.269.247,00	356.869.808,00	99,89
Total		3.797.686.604,00	3.339.721.731,00	87,94		3.797.686.604,00	3.339.721.731,00	87,94

B. Akuntabilitas Keuangan

1.1 REALISASI BELANJA

Dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan dinas selama Tahun 2025 melalui belanja langsung maupun tidak langsung.

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Sosial melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp. 11.461.943.049,00 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 10.581.073.000,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai 92,31%.

Komposisi belanja Dinas Sosial untuk tahun 2025, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.33
Komposisi Belanja Dinas Sosial
Tahun Anggaran 2025

No.	2025	
	Belanja Langsung	Jumlah
1	Belanja Operasi	10.755.433.674,00
2	Belanja Modal	706.509.375,00
	Total	11.461.943.049,00

Sumber: DPPA 2025

Tabel di atas memperlihatkan bahwa belanja langsung memberikan kontribusi sebesar 92,31% % terhadap realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2025.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinsos Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2025 Sampai dengan Triwulan III dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.34
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Sosial
Tahun 2025 Sampai Triwulan III

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	4.832.697.799,00	4.370.869.799,00	90,44
2	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1.869.149.694,00	1.814.176.368,00	97,06
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	4.760.095.556,00	4.396.026.951,00	92,35
	TOTAL	11.461.943.049,00	10.581.073.000,00	92,31

Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis sebesar 92,31% persen dengan formulasi hitungan realisasi anggaran dan Indikator Kinerja anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2025.

Tabel 3.35
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025 Sampai Triwulan III

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran %	Anggaran	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Terpenuhi	110	4.370.869.799,00	90,44

	Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kebutuhan Dasarnya			
2.	Meningkatnya Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mampu Berusaha	4,8	1.814.176.368,00	97,06
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinsos	99	4.396.026.951,00	92,35

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap anggaran efektif sebesar 90,44%, untuk mencapai Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan Kemampuan Berusaha Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terhadap anggaran efektif 97,06%, dan untuk mencapai Sasaran Strategis 3 yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial terhadap anggaran efektif sebesar 92,35%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

Adapun pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target sasaran dan indikator kinerja Renstra Dinsos Kabupaten Barito Kuala yang diperjanjikan pada tahun 2025 pada Triwulan IV dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36
Pagu dan Realisasi Anggaran
Yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis
dan Indikator Kinerja Dinas Sosial
Tahun 2025 pada Triwulan IV

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
1	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	6.701.847.493,00	6.185.046.049,00	98,62
2	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	3.797.686.604,00	3.339.721.731,00	87,94
	TOTAL	10.499.534.097,00	9.524.767.780,00	90,71

Dari penjelasan tabel diatas dapat diketahui bahwa Pagu dan Realisasi Anggaran yang Terkait Dengan Pencapaian Target Sasaran Strategis sebesar 92,31% persen dengan formulasi hitungan realisasi anggaran dan Indikator Kinerja anggaran yang direncanakan dan dimanfaatkan untuk efektivitas pencapaian kinerja sasaran yang diperjanjikan telah dilaksanakan Dinas Sosial pada tahun 2025.

Tabel 3.37
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Sasaran
Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025 Pada Triwulan IV

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Sasaran %	Anggaran	
				Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	96	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	98,62
2.	Meningkatnya Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	100	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri	87,94

Dari table diatas dapat dilihat bahwa untuk mencapai Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri terhadap anggaran efektif sebesar 98,02%, untuk mencapai Sasaran Strategis 2 yaitu Meningkatkan Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial terhadap anggaran efektif 87,94%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran pada tahun 2025 dapat dikatakan efektif terhadap pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala.

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala merupakan bentuk pertanggung jawaban tertulis atas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam pencapaian Vsi dan Misi selama tahun anggaran 2025 LKIP Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 ini menggambarkan keberhasilan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran.

Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala mempunyai satu sasaran dengan satu indikator kinerja sesuai dengan rencana Kinerja tahunan. Dari hasil capaian program dan kegiatan tersebut nilai kuantitatif secara keseluruhan umumnya baik. Beberapa masalah yang dihadapi adalah terbatasnya anggaran sehingga memerlukan solusi penambahan anggaran dari daerah.

Adapun Pencapaian Target Tahun 2025 dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja utama Dinas Sosial sampai Triwulan III yaitu “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” tercapai realisasi sebesar 110 persen, sedangkan indikator “sasaran” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” capaian realisasi sebesar 4,8 persen dan capaian realisasi pada indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah sebesar 99 persen dari target “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” sebesar 86,88 persen, sedangkan indikator sasaran ” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” target sebesar 0,83 persen dan target pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah sebesar 71,96 persen. Dengan kategori “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya” Sangat Baik, sedangkan indikator “sasaran” Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mampu berusaha” kurang dan Kategori pada indikator “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial” adalah Baik.

Pada Triwulan IV Keberhasilan Capaian IKU ditunjukkan pada indikator dengan capaian kinerja untuk indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” tercapai realisasi sebesar 67,53 persen dan capaian realisasi pada indikator “Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” 100 persen dari target

“Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” sebesar persen 70 persen” sedangkan indikator sasaran “Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” target sebesar 100 persen. Dengan kategori “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Mandiri” Cukup, sedangkan indikator “Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial” adalah Sangat Baik.

Sedangkan persentase realisasi anggaran sebesar 92,31 persen dari target dengan realisasi belanja sebesar Rp. 10.581.073.000,00.

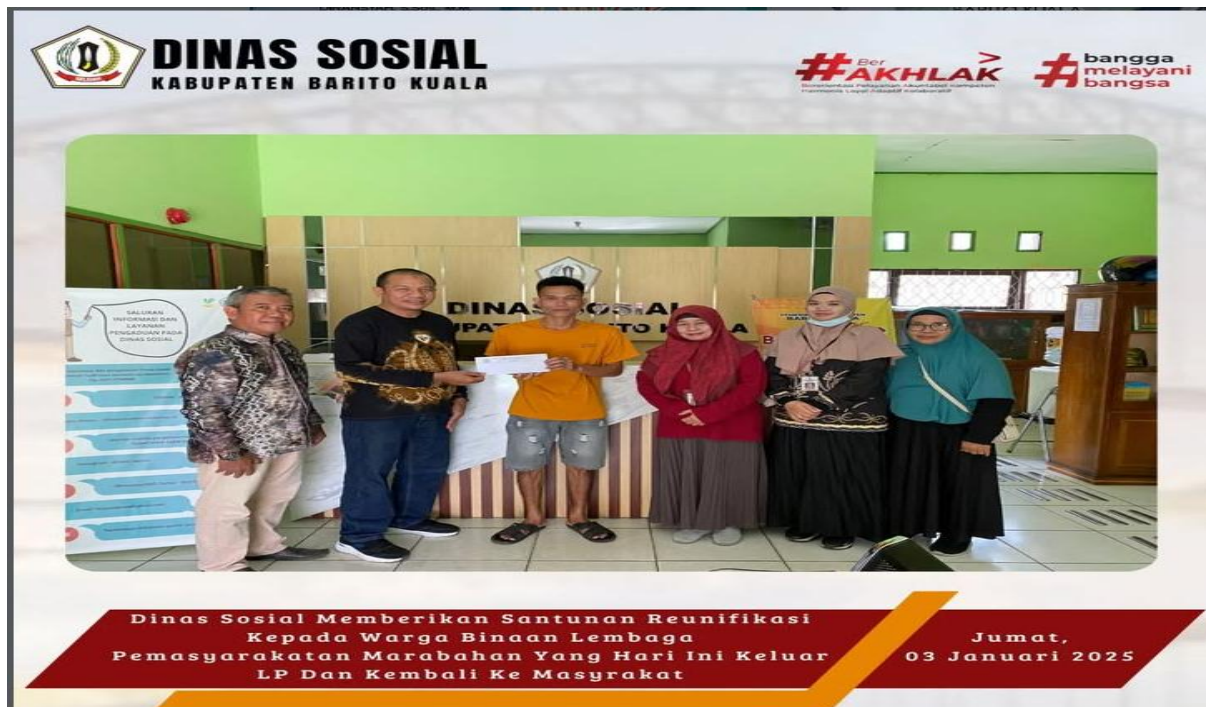
Adapun upaya perbaikan yang akan datang atau ditahun berikutnya adalah dengan menyampaikan usulan kepada Kementerian Sosial dan Dinas Sosial provinsi agar kegiatan yang belum diakomodir oleh APBD dapat difasilitasi melalui program kegiatan dan bantuan sosial serta meningkatkan koordinasi/kerjasama dengan SKPD terkait, upaya perbaikan lainnya yang dapat dilakukan pada tahun berikutnya adalah meningkatkan kualitas perencanaan program melalui pendataan yang lebih akurat dan terintegrasi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi secara tepat. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia pelaksana program melalui pelatihan dan bimbingan teknis agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan tepat sasaran. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga perlu ditingkatkan untuk memastikan setiap program berjalan sesuai target serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan perbaikan program di masa mendatang.

Kiranya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun anggaran 2025 pada Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala LKIP ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan inplementasi rencana kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) dimasa masa mendatang.

Marabahan, Januari 2026

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Dinas Sosial Memberikan Santunan Reunifikasi Kepada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Marabahan Yg Hari Ini Keluar Lp Dan Kembali Ke Masyarakat



Dinsos Batola Laksanakan Reunifikasi Orang Terlantar Ke Kabupaten Kapuas



Memfasilitasi Pengantaran Klien Ke PPRSDF Fajar Harapan Provinsi Kalimantan Selatan



Pengantaran Bantuan Logistik Untuk Korban Bencana Kebakaran





**Dinas Sosial Kab. Barito Kuala
Melakukan Penyerahan Bantuan Korban
Bencana Kebakaran**

**Kamis,
30 Januari 2025**

Dinas Sosial Barito Kuala Salurkan Bantuan Logistik Untuk Korban Banjir Di Mandastana



**Dinas Sosial Barito Kuala
Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Banjir
di Mandastana**

**Senin,
3 Februari 2025**

Penyerahan Bantuan Santunan Kematian Untuk Warga Desa Rimbun Tulang Kecamatan Kuripan Yang Diserahkan Oleh Kepala Desa Dan Sekcam Serta Plt.Kasi Kesra Kecamatan Kuripan



**Penyerahan Bantuan Santunan Kematian
Untuk Warga Desa Rimbun Tulang
Kecamatan Kuripan**

**Jumat,
28 Maret 2025**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Salurkan Bantuan Logistik Untuk Korban Angin Puting Beliung Di Kecamatan Mekarsari



**Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Salurkan
Bantuan Logistik untuk Korban Angin Puting Beliung
di Kecamatan Mekarsari**

**Rabu,
12 Februari 2025**



Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Salurkan Bantuan Logistik untuk Korban Angin Puting Beliung di Desa Sampurna Kecamatan Jejangkit

**Jumat,
21 Februari 2025**

Entry Meeting Audit Kinerja Pendahuluan Oleh Irban Iii Inspektorat



Entry meeting Audit Kinerja Pendahuluan oleh Irban III Inspektorat

**Senin,
20 Januari 2025**

Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala Raih Dua Penghargaan Bergengsi Di Anugerah Media Humas (Amh) Skpd 2024



Dinsos Dampingi Warga Batola Ke PantI Iskaya Banaran



Memfasilitasi Pemasangan Kaki Palsu Dalam Rangka Hari Disabilitas Internasional Dari
Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
An. Ibu Siti Fatimah Di Banjarmasin



Dinas Sosial Barito Kuala Fasilitas Reunifikasi Odg Terlantar Dengan Keluarga Di Banjarmasin



DINSOS, DINKES, KADES ANTAR JAYA BATOLA ANTAR ODGJ TERLANTAR KE RSJ SAMBANG LIHUM



09 APRIL 2025

REHABILITASI SOSIAL

Banjar - 9 April 2025, Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala sukses melaksanakan kegiatan pendampingan dan pengantaran seorang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terlantar bernama Nooriah (56 tahun) ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Kabupaten Banjar. Kegiatan ini merupakan bentuk respon cepat terhadap gangguan ketertiban yang dilakukan oleh Nooriah di kawasan Marabahan Kota, tepatnya di areal Hotel Prima dan sekitar Rumah Dinas Bupati Barito Kuala.

Reunifikasi Lansia Terlantar Yang Ditemukan Di Banjarmasin Kepada Keluarganya Yang Beralamat Di Desa Gampa Asahi Kecamatan Rantau Badauh



Reunifikasi Lansia Terlantar yang ditemukan di Banjarmasin kepada keluarganya yang beralamat di Desa Gampa Asahi kecamatan Rantau Badauh

Selasa,
18 Februari 2025

Dinas Sosial Barito Kuala Antar Dua Penyandang Disabilitas Ke Sentra Terpadu Surakarta

**DINSOS BATOLA ANTAR DUA PENYANDANG DISABILITAS
KE SENTRA TERPADU SURAKARTA**



25 FEBRUARI 2025

REHABILITASI SOSIAL

Surakarta, 25 Februari 2025 – Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala melaksanakan pendampingan dan pengantaran dua orang penyandang disabilitas asal Kabupaten Barito Kuala ke Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta, Jawa Tengah. Kegiatan ini dilakukan berdasarkan Surat Tugas Bupati Barito Kuala Nomor 000.1.2.3/0143/SETDA/2025 dan Surat Tugas Sekretaris Daerah Nomor 000.1.2.3/499/SETDA/2025.

Verifikasi Calon Penerima Bantuan Tangan Palsu



Verifikasi data dan wawancara kesiapan calon klien penerima bantuan tangan palsu a.n Satiman dari Desa Kolam kiri Dalam Kec. Barambai

Rabu,
27 Agustus 2025

Penyerahan Bantuan Kursi Roda Kepada Aparat Desa Simpang Nungki Yang Selanjutnya
Akan Diserahkan Ke Penyandang Disabilitas Di Desa Simpang Nungki



Penyerahan Bantuan Kursi Roda Kepada Aparat Desa
Simpang Nungki yang Selanjutnya akan diserahkan
ke Penyandang Disabilitas di Desa Simpang Nungki

Jumat,
17 Oktober 2025

Penutupan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Angkatan V Tahun 2025
Prspdnf Fajar Harapan Martapura



Penutupan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas Fisik Angkatan V Tahun 2025
PRSPDNF Fajar Harapan Martapura

Rabu,
25 Juni 2025

Dinas Sosial Barito Kuala Hadiri Acara Perpisahan Dan Pemulangan Klien Di Dua Panti Rehabilitasi Di Kota Banjarbaru



Dinas Sosial Barito Kuala Hadiri Acara Perpisahan Dan Pemulangan Klien di Dua Panti Rehabilitasi di Kota Banjarbaru

Kamis,
26 Juni 2025

Dinas Sosial Barito Kuala Dukung Implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Melalui Program Sekolah Rakyat



DINAS SOSIAL BARITO KUALA DUKUNG IMPLEMENTASI ASTA CITA PRESIDEN PRABOWO MELALUI PROGRAM SEKOLAH RAKYAT

Senin,
14 Juli 2025

Dinas Sosial Barito Kuala Laksanakan Monitoring Penyaluran Permakanan Di Lksa



**DINAS SOSIAL BARITO KUALA LAKSANAKAN
MONITORING PENYALURAN PERMAKINAN DI LKSA
HARAPAN KITA KECAMATAN TAMBAN**

**Selasa,
01 Juli 2025**



**DINAS SOSIAL BARITO KUALA MONITORING
PENYALURAN PERMAKINAN DI LKSA HIDAYATULLAH
KECAMATAN TABUNGANEN**

**Rabu,
02 Juli 2025**

Sosialisasi Napza Di Smkn 2 Marabahan



Dinas Sosial Menerima Penghargaan Peringkat I Kategori Media Sosial Teraktif Dan Peringkat Ii Kategori Website Teraktif.



Asistensi Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lppd) Dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Spm) Kab. Barito Kuala



Asistensi penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD)
dan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Kab. Barito Kuala Tahun 2024

Jumat,
24 Januari 2025

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025



PENANDATANGANAN PERJANJIAN KINERJA (PK)
KEPALA DINAS SOSIAL DENGAN PJ. BUPATI BATOLA
DI AULA SELIDAH PEMERINTAH KAB.BATOLA
TAHUN 2025

Senin,
3 Februari 2025

Internalisasi Aplikasi E-Sakip Sistem Akuntabilitas Terpadu Dan Unggul (Satu) Kabupaten Barito Kuala



Workshop Penyusunan Dan Penyesuaian Peta Jabatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala



Dinas Sosial Barito Kuala Tingkatkan Kinerja Pelayanan Publik, Raih Predikat A- Dalam Pekppp 2024



Monitoringnya Dan Evaluasi Petugas Slrt Di Desa Tamban Muara Kecamatan Tamban





**Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi
Petugas SLRT di Kelurahan Berangas Tengah
Kecamatan Alalak**

**Rabu,
12 Maret 2025**

Monitoring Penyaluran Pkh /Sembako Kpm Kec Cerbon Penyalurannya Di Kantor Pos
Marabahan Selasa Tanggal 25 Pebruari 2025



**Monitoring penyaluran PKH /Sembako KPM
Kec Cerbon Penyalurannya di Kantor POS Marabahan**

**Selasa,
25 Februari 2025**

Mendampingi Pendamping Pkh Membagikan Kartu Kesejahteraan Sosial (Kks) Untuk Keluarga Penerima Manfaat Pkh Dan Penerima Sembako



Bidang Linjamsos Dinas Sosial Mendampingi
Pendamping PKH Membagikan Kartu Kesejahteraan Sosial
(KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat PKH dan
Penerima Sembako

Kamis,
11 September 2025

Launching Penyaluran Bantuan Pangan Beras Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025



LAUNCHING PENYALURAN BANTUAN PANGAN BERAS
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

Selasa,
22 Juli 2025

Keg. Rakornas Implementasi Penggunaan Dtsen Utk Bansos, Dayasos Dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Di Jakarta



Penyerahan Program Bantuan Kemanusiaan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Melalui Baznas Kabupaten Barito Kuala



Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Psks) Tahun 2025



Monitoring Dan Evaluasi Serta Pembinaan Uep Perorangan Usaha Ternak Ayam Di Desa Indah Sari Kecamatan Mekarsari



Kegiatan Serah Terima Bantuan Uep Kube Pokir Berupa Tenda Dan Perlengkapannya Di
Desa Terantang Kecamatan Mandastana



Penelitian Adm. Dan Peninjauan Lapangan Bagi Penerima Bantuan Peralatan Rumah Tangga
Dan Sembako Yang Mendapatkan Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana



Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Ke-80 Republik Indonesia. Semoga Dengan Adanya Peringatan Ini Dapat Menambah Rasa Cinta Tanah Air Dan Nasionalisme Kita Untuk Indonesia Kita Tercinta.



Bimbingan Teknis Pengumpulan Uang Dan Barang (Pub)

